

Dinamika Konflik China dan Tibet: Pendekatan Perdamaian Demokratis sebagai Upaya Penyelesaian Konflik

Nabhan Aiqani¹

¹Andalas International for International Studies (ASSIST), Universitas Andalas, Indonesia,
aiqoni.nabhan21@gmail.com

ABSTRACT

The conflict between China and Tibet is a historic conflict. The two regions have been confronting for a long time. Tibet is firm with its stance to become an independent state. Meanwhile, China has always used military force or violence to quell acts of rejection and attempts to seize independence carried out by Tibet. So to analyze this, the author uses several indicators of the realization of democratic peace, First, connectivity in one international institution or organization. Second, geographical proximity. Third, there is an alliance. Fourth, distribution and equitable resource allocation. Fifth, guaranteed political stability. The results of the study found that almost all of these indicators were not fulfilled well in relations between China and Tibet. This relation shows a wide gap between China and Tibet. So that on this basis the conflict is difficult to stop.

Keywords: *China, Tibet, Democratic Peace Theory.*

ABSTRAK

Konflik antara China dan Tibet merupakan konflik bersejarah. Dua wilayah tersebut telah berkonfrontasi dalam jangka waktu yang lama. Tibet kukuh dengan pendirian untuk menjadi negara merdeka. Sementara, China selalu menggunakan kekuatan militer atau kekerasan untuk meredam aksi penolakan dan upaya-upaya merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh Tibet. Sehingga untuk menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan beberapa indikator terwujudnya perdamaian demokratis, *Pertama*, keterhubungan dalam satu lembaga atau organisasi internasional. *Kedua*, Kedekatan secara geografis. *Ketiga*, adanya satu aliansi. *Keempat*, Distribusi dan alokasi sumberdaya yang merata. *Kelima*, Stabilitas politik yang terjamin. Hasil penelitian menemukan bahwa hampir semua indikator tersebut tidak terpenuhi dengan baik dalam relasi China dan Tibet. Relasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar antara China dan Tibet. Sehingga atas dasar ini konflik sukar untuk dihentikan.

Kata Kunci: China, Tibet, Teori Perdamaian Demokratis

Pendahuluan

Tibet telah menjadi teka-teki bagi dunia selama berabad-abad. Ada banyak upaya penaklukan yang berulang kali dilakukan dikarenakan keingintahuan yang kuat tentang tanah misterius ini. Selama bertahun-tahun, Tibet selalu berusaha mempertahankan kemerdekaannya dengan mengklaim sebagai bangsa yang berdaulat, namun Cina dengan gigih memproklamkan bahwa Tibet adalah bagian dari kedaulatan Cina.¹ Secara historis, Pemerintah Cina hanya pernah mencoba dua kali untuk menjalankan pemerintahan langsung di Tibet. Setiap upaya untuk mewujudkan pemerintahan langsung tersebut telah dilakukan, terutama melalui operasi militer yang ditandai dengan perlawanan sengit dan terjadi berulang-ulang. Upaya pertama, pendudukan singkat Lhasa (ibu kota Tibet) oleh tentara Cina pada 1910-1912, namun gagal setelah berbulan-bulan pertempuran jalanan dengan tentara Tibet. Periode pemerintahan langsung tersebut menyebabkan pengasingan bagi kepemimpinan Tibet, menciptakan krisis identitas bagi bangsa Tibet, dan menyebabkan kepahitan mendalam di antara warga Tibet terhadap para anggota elit yang dipandang sebagai kolaborator, meskipun itu juga memicu niat gerakan pada modernisasi.

Selanjutnya, upaya Cina kedua untuk menjalankan pemerintahan langsung di Tibet masih berlangsung, meskipun memiliki hasil yang serupa dengan sebelumnya, dan terus menghadapi perlawanan yang cukup besar.² Cina memperoleh kembali kendali atas wilayah Tibet pada tahun 1950 dan sembilan tahun kemudian akhirnya menggantikan pemerintah tradisional Tibet dan memulai upaya keduanya pada pemerintahan langsung. Pemerintahan langsung

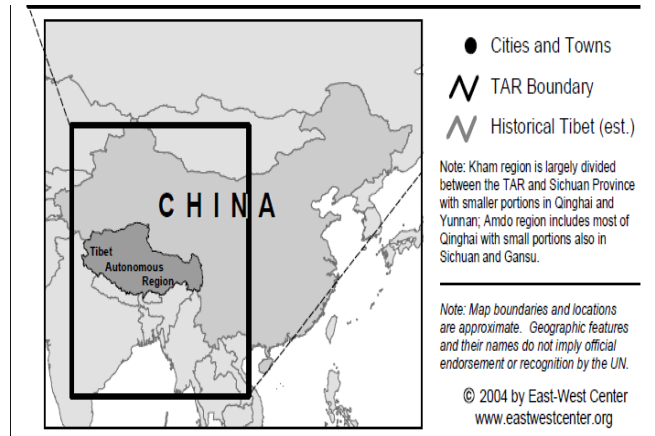
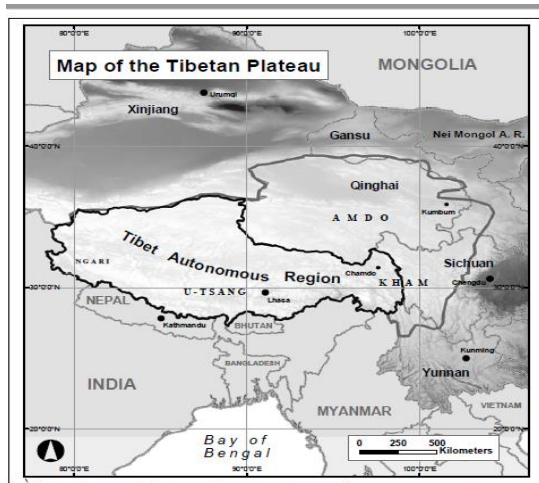
China terhadap Tibet menimbulkan tiga gelombang besar perlawanan oposisi dalam 20 tahun pertama: tahun 1956-1958 di Tibet Timur, 1959 di Lhasa, dan 1969 di Nyemo dan daerah pedesaan lainnya, serta serangan gerilya oleh para eksil (masyarakat Tibet yang terasingkan) yang berbasis di Nepal dari tahun 1960 hingga 1974. Serangkaian peristiwa tersebut sebagian besar terdiri dari pemberontakan bersenjata atau serangan oleh tentara tidak resmi, gerombolan tingkat desa, atau pasukan gerilya.

Sejak kematian Mao pada tahun 1976, ada upaya konsisten terhadap liberalisasi masyarakat Cina, dengan toleransi yang jauh lebih besar terhadap keragaman, agama, dan perjalanan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Tibet cenderung melakukan perlawanan melalui serangkaian demonstrasi besar, yang paling menonjol adalah empat demonstrasi besar yang terjadi antara Oktober 1987 dan Maret 1989, rangkaian panjang demonstrasi yang lebih kecil dari 1989 hingga 1996, dan unjuk rasa Maret dan April 2008.

Beranjak dari fenomena tersebut, peneliti ingin menemukan deskripsi utuh tentang konflik antara Cina dan Tibet serta bagaimana posisi kedua kelompok tersebut, agar nantinya ditemukan formulasi yang tepat mengenai penanganan penyelesaian konflik antara Pemerintah Cina dan Tibet.

¹Phillip J. Barton. *Tibet and China: history, insurgency, and beyond* (pp. 1). Master Thesis, Naval Postgraduate School. 2003.

²Robert Barnett. *The Tibet Protests of Spring 2008: Conflict between the Nation and the State. China Perspective*, pp. 6. 2009.



Sumber: Warren Smith, "China's Policy on Tibetan Autonomy," *East West Center Washington Working Papers*, no. 2 (October 2004), 47.

Teori Perdamaian Demokratis/Liberal

Menurut Rosato, Teori perdamaian demokratis mengklaim bahwa dalam sistem demokrasi negara-negara akan jarang saling bertikai karena mereka berbagi norma umum dalam kehidupan sosial dan institusi domestik yang terbangundengan sendirinya akan membatasi jalan menuju perang.³ Bagi pendukungnya, teori perdamaian demokratis membawa sebuah optimisme dalam melihat masa depan perdamaian internasional. Selanjutnya, untuk menciptakan perdamaian menurut mereka mesti dilakukan dengan menyebarkan demokrasi ke seluruh negara di

dunia. Ada satu kepercayaan, semakin demokratis suatu negara, maka akan semakin damai negara itu. Inilah yang menjadi alasan kenapa ide tentang zona demokrasi damai secara rutin dibahas dalam forum akademik dan lingkaran pembuat kebijakan.⁴

Menurut Russet ada beberapa kondisi yang menyebabkan negara-negara demokratis mampu mewujudkan perdamaian diantara sesama. Kondisi ini perlu untuk dibahas sebagai upaya untuk menemukan variabel-variabel yang membuat Cina dan Tibet tidak pernah berhenti berkonflik. *Pertama*, keterhubungan dalam satu lembaga atau organisasi internasional. *Kedua*, kedekatan secara geografis. *Ketiga*, adanya satu aliansi. *Keempat*, distribusi dan alokasi sumberdaya yang merata. *Kelima*, stabilitas

³ Sebastian Rosato. The Flawed of Democratic Peace Theory. *American Political Science Review* 97, 4, pp. 585. 2003.

⁴ Miriam Fendius Elman. "Introduction. The Need for a Qualitative Test of the Democratic Peace Theory" dalam Munafrizal Manan. *The Democratic Peace Theory and Its Problem. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 10, 2. 2014.

politik yang terjamin.⁵ Semua kondisi tersebut, menjamin terwujudnya perdamaian dalam sistem demokrasi. Sehingga, kondisi tersebut mesti diuji dengan melihat realita yang ada pada konflik China-Tibet.

Sejarah Pendudukan China atas Tibet

Untuk memahami apa yang menyebabkan invasi Cina ke Tibet pada tahun 1950 yang menandai penguasaan penuh Cina atas Tibet, perlu untuk didedahkan kembali sejarah awal berdirinya Tibet. Meskipun bukti dokumentasi tentang pembentukan Tibet belum tersedia, namun sebuah konsensus telah dicapai: “Sebagian besar pakar Tibet setuju bahwa sejarah Tibet yang tercatat dimulai dengan penobatan Son-Tsan Gam-Po pada tahun 620M, dan pemerintahannya hingga tahun 650 M”.⁶ Selama periode ini, ia menikahi seorang putri Nepal dan seorang putri Cina. Fakta ini penting karena dua alasan. Pertama-tama, kedua putri adalah Buddha, dan, meskipun mereka bukan yang pertama memperkenalkan Buddhisme ke Tibet, namun mereka membantu menyebarkan agama Buddha yang mengarah pada terpinggirkannya agama asli Tibet, agama Bon.⁷

Sementara itu, pernikahan Son-Tsan Gam-Po dengan putri Cina, Wencheng, adalah bagian dari perjanjian gencatan senjata, setelah pasukannya mengalahkan Cina. Dengan kedatangan Putri China pada 641, pemimpin Tibet mulai terpengaruh oleh budaya Cina, dan sifat-sifat Cina mulai menggantikan karakteristik Nepal. Namun, seberapa besar dampak budaya Cina di Tibet pada saat itu masih dipertanyakan karena, pada saat yang sama, orang Tibet

mengadopsi aksara India untuk bahasa tulisan mereka. Meskipun demikian, terlepas dari berbagai pengaruh ini, bagi pemerintah Cina saat ini informasi selektif tersebut dapat digunakan sebagai keuntungan untuk menguatkan legitimasi Cina atas Tibet. “Pemerintah Cina mengklaim bahwa kedatangan Wencheng di Tibet menjadi tanda dimulainya proses peradaban dan asimilasi budaya dan politik Tibet ke Cina.”⁸ Sehingga dapat dikatakan, persinggungan antara Tibet dan Cina telah dimulai sejak lama.

Setelah periode Son-Tsan Gam-Po, Kerajaan Tibet kehilangan sosok kharismatik dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Memanfaatkan kondisi demikian, dan didukung oleh situasi sosial dan budaya yang telah mengalami asimilasi dengan Cina akibat dari pernikahan Son-Tsan Gam-Po dengan Putri Cina, akhirnya Cina melakukan invasi untuk pertama kali menuju Tibet. Artinya aksi invasi yang dilakukan Cina pada abad modern tahun 1950-an, merupakan serangkaian panjang dari upaya invasi yang telah dilakukan semenjak 1300 tahun yang lalu.

Aksi invasi Cina tahun 1950 yang menandakan awal mula pendudukan Cina atas Tibet, dimulai ketika Raja Tibet yang diberi gelar Dalai Lama, Tenzin Gyatso atau Dalai Lama ke-14 menjabat. Ketika itu tentara merah Cina, berhasil menguasai ibu kota provinsi Tibet yaitu Lhasa dan mengusir Dalai Lama dari kekuasaannya. Pada tanggal 17 Maret 1959, menghindari invasi Cina, Dalai Lama berhasil meloloskan diri melalui usaha pelarian yang dipimpin oleh Gampo Tashi, dan mendirikan semacam pemerintahan pelarian di Dharamsala, India utara sampai sekarang.⁹

⁵ Bruce Russett, *Grasping at the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World* (pp. 378-383). Princeton, NJ: Princeton University Press. 1993.

⁶ W. S. Smith Jr., *Tibetan Nation Boulder* (pp. 12) CO: Westview Press, Inc. 1996.

⁷ Phillip J. Barton. *Tibet and China: history, insurgency, and beyond* (pp. 9). Master Thesis, Naval Postgraduate School. 2003.

⁸W. S. Smith Jr., *op.cit*, pp. 63

⁹Central Tibetan Administration. Glimpses on History of Tibet. Diakses melalui: <http://tibet.net/about-tibet/glimpses-on-history-of-tibet/>

Pada tanggal 28 Maret 1959 PM China, Zhou Enlai berhasil membekukan pemerintahan Tibet. Dalai Lama dan para menterinya yang berada di India bereaksi keras atas dibentuknya pemerintahan baru Tibet yang dikontrol oleh Cina. Menurut mereka, pemerintahan tersebut tidak akan pernah diakui oleh rakyat Tibet. Di India, Dalai Lama membangun kembali pemerintahannya di pengasingan dan kepada masyarakat dunia ia mengatakan bahwa “Di manapun saya berada, bersama dengan pemerintahan saya, rakyat Tibet mengakui kami sebagai pemerintah Tibet”. Setelah itu 80.000an rakyat Tibet diketahui telah berjalan untuk berpindah tempat hingga ke perbatasan India, Nepal, Bhutan, dan Sikkim.¹⁰

Pada tahun 1976, pada saat Mao meninggal dan pada tahun 1980 terpilih Hu Yaobang sebagai sekretaris jendral partai komunis memberikan harapan bagi warga Tibet. Karna Hu Yaobang dalam pidatonya menjelaskan warga Tibet harus memiliki hak otonomnya sendiri. Dan pada kunjungannya Mei 1980 ia meminta maaf pada masyarakat Tibet atas kebijakan pemerintahan yang salah dari pemerintahan pusat China di Tibet. Karena sikapnya ini pada tahun 1987 Hu Yaobang disingkirkan dari partai komunis China.

Pada tahun 1989 terjadi protes besar-besaran dalam rangka memperingati 30 tahun pemberontakan di Tibet. Hal ini menunjukkan gagalnya Cina untuk merubah sikap warga Tibet. Karena itu kebijakan politik penempatan warga Cina di Tibet adalah satu-satunya penyelesaian dalam artian jika tidak dapat membuat masyarakat Tibet bagian dari Cina maka warga Cina lah yang harus menenpati Tibet, dengan kedatangan warga Cina penduduk Tibet akan menjadi minoritas. Dan menurut Cina

masalah mengenai pemberontakan dapat diselesaikan.

Dewasa ini, Tibet merupakan wilayah otonomi komunis Cina, yang tempatnya sangat jauh dan sangat tinggi. Tibet juga disebut Atap Dunia serta Tanah Salju. Tibet merupakan wilayah dunia yang misterius dan terencil karena pegunungan tinggi yang mengelilinginya. Dibalik kemisteriusan daerah ini menyimpan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini bahkan masyarakat Tibet menuntut untuk menjadi sebuah negara yang independen. Karena otonomi daerah yang dijanjikan oleh pemerintah Cina. Akan tetapi pemerintah Cina tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut karena pertimbangan berbagai hal.¹¹

Pada periode berikutnya, gerakan akar rumput (*grassroot movement*) yang konsisten melakukan perlawanan terhadap pemerintah Cina mencapai puncaknya pada 1990-an. Hal ini berimbas pada perlawanan di Tibet yang menemui jalan buntu. Kebijakan Cina terhadap Tibet, yang menggabungkan pembatasan politik dengan aliran subsidi ekonomi, telah berhasil membasmi perbedaan pendapat dan menghancurkan semua simbol perlawanan yang terorganisir. Di panggung internasional, pertumbuhan ekonomi Cina memikat Barat, dan pemerintah mulai menaruh fokus menuju Beijing. Pada pergantian milenium, kecuali untuk protes sesekali yang dilakukan oleh pendeta secara tunggal atau berkelompok, Tibet pada masa ini, tampak relatif tenang.¹²

Pada dasarnya, gejala konflik antara Cina dan Tibet mengalami siklus dinamis. Terkadang konflik dan protes muncul, tapi dilain waktu konflik justru dapat diredam. Namun,

¹⁰Maya Hastuti. Opsi Jalan Tengah Dalai Lama Dalam Penyelesaian Konflik China Tibet. *Jurnal Studi Hubungan Internasional 1,1*, pp. 57. 2011.

¹¹Tao Cheng. Negara Bangsa (jilid 3; Asia).

¹²Tenzin Dorjee. *The Tibetan Non-Violent Struggle: A Strategic and Historical Analysis*(pp. 61). Washington: International Center on Non-Violent Conflict. 2015.

disebalik itu, konflik antara Cina dan Tibet tidaklah benar-benar berakhir meskipun pada suatu waktu intensitas menurun. Dari tahun 2001 hingga 2007, diawali dengan kebangkitan dari banyaknya aspek kebudayaan Tibet - bahasa, musik, seni dan sastra - menyaksikan kebangunan rohani serupa dengan yang terjadi pada tahun 1980-an. Kebangkitan budaya ini menciptakan rasa kebanggaan Tibet, memperkuat identitas pan-Tibetan di seluruh dataran tinggi.

Oleh karena itu, mengejutkan dunia ketika di Tibet kembali meletus pemberontakan nasional pada tahun 2008 yang melampaui dua pemberontakan populer dalam hal luas, cakupan dan durasi. Pada tahun 2008, gejala kembali muncul antara Cina dan Tibet, ketika perhatian internasional terfokus pada Cina tahun 2008 saat menjelang Olimpiade Beijing. Pada saat itu, terjadi sebuah insiden protes, ketika rute obor yang direncanakan melewati Tibet ke puncak Gn. Everest. Hal ini menurut tokoh dan pendeta Tibet, dianggap sebagai upaya Cina untuk menegaskan bahwa Cina ingin menggunakan Olimpiade untuk membuktikan bahwa Tibet adalah bagian yang tidak dapat dipisah dari Cina dan bahwa orang Tibet senang hidup di bawah kekuasaan Cina.

Sebagai bentuk protes dan perlawanan, pada 10 Maret di Cina, selama Olimpiade, para biksu Buddha berbaris dari biara-biara di sekitar Lhasa untuk menandai peringatan ke-49 pemberontakan Tibet melawan pemerintah Cina. Banyak orang Tibet menyatakan perasaan mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia Cina, serta mendidik seluruh dunia tentang situasi mereka melalui protes dan demonstrasi.

Aksi Penangkapan Demonstran Tibet Anti China 2008

Pada tanggal 10 Maret 2008 bertepatan dengan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Tibet terhadap pemerintah Cina, rakyat Tibet, para

bhiksu, dan mahasiswa berkumpul di Biara Drepung untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk menuntut pemerintah Cina agar membebaskan 50 sampai 60 bhiksu yang ditahan pada akhir Oktober 2007. Para bhiksu tersebut ditahan karena mereka merayakan diberikannya Medali Emas Kongres kepada Dalai Lama di Washington yang sangat mengecewakan Cina. Kerusuhan di Lhasa ibukota Tibet ini juga menewaskan 22 orang. Karena masyarakat Tibet merasa gerakan Cina untuk menekan Tibet semakin kuat semenjak Cina menjadi raksasa ekonomi Asia. Cina membatasi gerak-gerik bangsa Tibet seperti melarang penggunaan bahasa asli Tibet dan memaksa menggunakan bahasa Cina, melarang untuk memperkenalkan budaya Tibet kepada wisatawan yang datang ke Tibet, dan masyarakat Tibet cenderung tidak mendapatkan perlindungan

Selain menuntut pembebasan bagi para bhiksu, rakyat Tibet menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kepada dunia mengenai kondisi mereka yang memprihatinkan di bawah pemerintahan Cina. Bergejolaknya Tibet kembali setelah hampir 20 tahun tanpa suara di bawah pemerintahan Cina disebabkan oleh beberapa faktor. Ketidakpuasan rakyat Tibet semakin dirasakan karena dengan dibukanya jalur kereta api pan Himalaya semakin menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi nilai dan kapabilitas nilai Tibet. Rakyat Tibet sebagai penduduk lokal merasa berhak menjadi prioritas dalam kebijakan Cina agar dapat menikmati hasil pembangunan yang telah dicapai di wilayah Tibet dan dapat menjaga kelestarian agama dan budayanya. Namun pada kenyataannya semakin mudahnya transportasi semakin berbondong-bondong imigran masuk ke Tibet.¹³

¹³ Stephanie R. F. *Demonstrasi Anti China di Lhasa, Tibet pada maret 2008*. Jember: Skripsi Unej. 2008.

Selain itu dominasi Cina juga diperlihatkan dengan arogansi dan pendekatan koersif untuk menekan tuntutan rakyat Tibet untuk memperoleh Otonomi Khusus. Padahal sejatinya Dalai Lama telah menurunkan tensi untuk mengakomodir konflik tidak semakin merebak, yang sebelumnya menuntut kemerdekaan menjadi diberlakukannya Otonomi Khusus atas wilayah Tibet. Namun hal itu tidak disambut baik pihak Cina, bahkan Pada Maret 2008 di Tibet terjadi kerusuhan di Lhasa ibukota Tibet dan menewaskan 22 orang. Karena masyarakat Tibet merasa gerakan Cina untuk menekan Tibet semakin kuat semenjak Cina menjadi raksasa ekonomi Asia. Cina membatasi gerak-gerik bangsa Tibet seperti melarang penggunaan bahasa asli Tibet dan memaksa menggunakan bahasa Cina, melarang untuk memperkenalkan budaya Tibet kepada wisatawan yang datang ke Tibet, dan masyarakat Tibet cenderung tidak mendapatkan perlindungan.¹⁴

Dominasi China atas Sumber Daya Ekonomi Tibet

Menurut Gabriel Lafite, seorang peneliti Australia dalam buku *Spoiling Tibet*, eksploitasi Cina atas sumber daya alam Tibet adalah salah satu masalah paling penting bagi masa depan Tibet. Ambisi Cina untuk memperoleh sumber daya alam Tibet adalah motivasi utama bagi PKC (Partai Komunis Cina) untuk menyerang dan mencaplok Tibet pada 1950-1951. Eksploitasi sumber daya alam Tibet telah menjadi kegiatan utama Cina di Tibet sejak dahulu dan terutama di antara rencana Cina untuk Tibet di masa depan. Tahun 1980-an dan 1990-an merupakan fase awal eksploitasi Cina terhadap Sumber Daya Alam Tibet yang paling ekstrem. Pada saat demam penambangan emas

¹⁴Maya Hastuti. Opsi Jalan Tengah Dalai Lama dalam Penyelesaian Konflik China-Tibet. *Jurnal Studi Hubungan Internasional UMM* 1, 1, pp. 57. 2011.

yang sangat merusak lingkungan dilakukan oleh sebagian besar usaha individu berskala kecil di sungai Kham dan Amdo. Setelah itu, eksploitasi sumber daya alam Tibet dimulai dengan penambangan skala besar oleh organisasi pemerintah Cina seperti Polisi Bersenjata Rakyat atau oleh perusahaan milik negara. Pada awalnya, penambangan skala industri sebagian besar ditujukan untuk kromium karena jumlah mineral yang relatif besar ditemukan di beberapa tambang dan harga tinggi mineral pada saat itu.¹⁵

Konsekuensi dari munculnya industri penambangan Cina skala besar membuat Tibet semakin mudah dicapai. Sejak 2006 bahkan ada jalur kereta api di wilayah itu. Jalur ini memungkinkan semakin banyak warga Cina yang datang ke Tibet. Dieter Schuh¹⁶ mengatakan, pada umumnya orang Cina melakukan dua tugas di Tibet:

“Mereka mendominasi jabatan di bagian administrasi pemerintahan dan militer. Kebanyakan tentara Cina ditempatkan di wilayah itu. Dan mayoritas di situ terutama sibuk mengurus kekayaan alam di Tibet.”

Tibet memang merupakan gudang kekayaan alam. Misalnya, pertambangan krom terpenting Cina terdapat di Tibet. Sungai-sungai terpenting Asia bersumber di negeri itu. Belum lagi peranan strategisnya. Tibet adalah zona penahan menghadapi negara tetangga di selatan dan India, saingan Cina. Pada tahun 1960-an, Cina bahkan pernah berperang dengan negara adidaya nuklir itu. Di sini mungkin juga tersimpan alasan-alasan kepentingan Cina terhadap Tibet.¹⁷

¹⁵Warren Smith, “A Compilation of A Series of “Expert on Tibet Program” for Radio Free Asia,” based upon the Book “*Spoiling Tibet: China and Resource Nationalism on the Roof of the World*” by Gabriel Lafitte.

¹⁶Dieter Schuh merupakan seorang guru besar emeritus Tibetologi di Bonn University, Jerman.

¹⁷Deutsche Welle. (2009, Maret 8). Tiada Perdamaian di Shangri-La – Konflik China dan Tibet. Diakses

Pada desember 2016 lalu, untuk pertama kalinya Cina mulai mengangkut air minum kemasan dari Tibet ke daerah pedalaman dengan menggunakan kereta kargo. Sebanyak 1890 ton air kemasan diangkut dengan 35 gerbong dari Tibet, dan akan melakukan perjalanan sejauh 4.500 km selama enam hari untuk sampai ke tujuan. Tibet selama ini dikenal sebagai *Asia Water Tower*, daerah dengan sumber daya air terbesar. Tibet menghasilkan lebih dari 400.000 ton air minum alami pada 2015, namun karena biaya transportasi tinggi membuatnya sulit untuk menembus pangsa pasar.¹⁸

Dibalik kekayaan sumber daya alam Tibet yang telah di eksploitasi oleh China, ada ironi yang muncul tentang kondisi riil masyarakat Tibet. Pada beberapa dekade terakhir, memang telah banyak kemajuan luar biasa di bidang pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial di Daerah Otonomi Tibet (*TAR/Tibet Autonomous Region*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah meningkat secara mengesankan dari 0,387 pada tahun 1990 menjadi 0,586 pada tahun 2003, menggerakkan kawasan dari tingkat pembangunan rendah ke ambang pembangunan menengah. Rata-rata GDP tahunan sebesar 6.871 yuan cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Cina yang miskin. Terlepas dari peningkatan yang signifikan ini, bagaimanapun Tibet terus berada di peringkat terakhir di antara 31 provinsi dan wilayah Cina dalam hal indikator pembangunan manusia. Tingkat pendidikan sangat rendah sehingga berdampak pada IPM: lebih dari 45% laki-laki dan 62% perempuan Tibet buta huruf atau semi buta huruf. Harapan hidup, kurang dari 66 tahun, juga merupakan tingkat terendah di Cina. Perbedaan antara desa dan kota besar:

melalui: <https://www.dw.com/id/tiada-perdamaian-di-shangri-la-konflik-china-dan-tibet/a-4081865>

¹⁸Agung DH. Tirto.(2016, Desember 29).“China Mulai Eksploitasi Air Alami Tibet,” Diakses melalui:<https://tirto.id/cina-mulai-eksploitasi-air-alami-tibet-cc4m>

PDB perkotaan rata-rata 19.891 yuan sementara di daerah pedesaan - di mana sebagian besar penduduk Tibet hidup - hanya mencapai 3.837 yuan. Hal ini menekankan perlunya pembangunan yang seimbang dan berpusat pada manusia di Tibet, untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kemampuan di seluruh penduduk. Penyesuaian yang dilakukan dengan relatif mudah di tempat lain namun tampaknya membutuhkan waktu lebih lama di Tibet, dan ini menuntut perhatian yang meningkat dari donor serta pemerintah.¹⁹

Tanggapan Publik Internasional Terhadap Konflik China-Tibet

Konflik Tibet bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ada banyak perhatian dan dukungan dunia internasional yang menyerukan agar pendudukan dan aksi kekerasan Cina terhadap Tibet segera dihentikan. Salah satunya, adalah upaya dukungan dari masyarakat Amerika – meliputi legislator, aktivis dan pembela hak asasi manusia yang prihatin dengan penindasan selama puluhan tahun di Tibet. Pada 11 Desember 2018, Kongres Amerika Serikat dengan suara bulat meloloskan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang bertujuan langsung pada perlakuan tidak adil pemerintah Cina terhadap orang Amerika dan mendorong kembali menentang isolasi Tibet dari dunia luar, yang disebut sebagai *The Reciprocal Access to Tibet Act of 2018* (H.R. 1872). Dan sekarang, RUU tersebut telah diserahkan ke meja Presiden Trump, yang diharapkan untuk menandatangani RUU itu menjadi undang-undang.²⁰

¹⁹ UNDP, *Tibet Development and Poverty Alleviation Programme* (pp. 5). China: United Nations Development Programme. 2010.

²⁰International campaign for Tibet.(2018, Desember 11).Legislative Landmark: US Congress Passes Reciprocal Access to Tibet Act. Diakses melalui: <https://www.savetibet.org/legislative-landmark-us-congress-passes-reciprocal-access-to-tibet-act/>

Upaya yang dilakukan masyarakat Amerika Serikat tersebut bukanlah yang pertama dilakukan. Pada tahun 2001, Kongres AS juga pernah mengusulkan diberlakukannya pendekatan komprehensif mengenai Tibet dengan cara menunjuk seorang coordinator khusus mengenai isu Tibet, khususnya pada lingkup pelanggaran HAM Cina. Tapi, sikap AS dipandang masih setengah hati, sebab disatu sisi AS masih mengakui kebijakan *One China Policy* dengan menyatakan bahwa Tibet adalah bagian dari teritori Cina. Meskipun demikian, kebijakan AS tersebut tidak serta merta menciderai komitmen mendukung Tibet. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan dan perlindungan penuh AS terhadap Dalai Lama. Setelah itu, komitmen AS selalu ditunjukkan dengan draf resolusi yang dikeluarkan oleh kongres AS tahun 2002, 2009 hingga paling anyar 2018 ini.²¹

Selain itu, pada tahun 2009 Dewan HAM PBB mendesak Cina untuk menempuh upaya-upaya dalam reformasi peradilan, hak-hak suku minoritas, maupun pengurangan kemiskinan. Namun utusan khusus Cina untuk dewan itu, Wu Hailong, menegaskan bahwa dunia sudah menerapkan rekomendasi yang disampaikan. Sementara itu, disaat yang bersamaan di luar gedung PBB, sekelompok warga Tibet menggelar aksi unjuk rasa menentang yang mereka sebut sebagai pendudukan Beijing di Tibet. Sejak tahun 2009 diperkirakan sekitar 120 warga Tibet melakukan aksi bakar diri -dan sebagian sampai tewas- untuk menentang pemerintah Cina.²²

Meski dihadang berbagai tuntutan dari dunia luar, respon yang diberikan Cina justru lebih memilih mengelak dari semua tuduhan yang ada. Cina menunjukkan bahwa mereka berkomitmen penuh terhadap masalah HAM kelompok minoritas dengan menandatangani sejumlah rezim HAM internasional. Diawali dari keikutsertaan Cina bergabung dengan PBB tahun 1971, kemudian menjadi pengamat pada sidang tahunan *United Nation Convention of Human Rights* (UNCHR) tahun 1979 hingga 1981, hingga diterima menjadi anggota pada tahun 1982. Pada 1990, komitmen terhadap masalah HAM ditunjukkan dengan mengirim perwakilan pada *United Nation Conference on Human Rights* tahun 1993 serta pada tahun 2004, delegasi Cina ikut berpartisipasi pada *the 60th Session of the United Nations Commission on Human Rights, the Substantive Session of the United Nations Economic and Social Council, dan the Third Committee Meeting of the 59th Session of the United Nations General Assembly*. Dengan strategi seperti ini, Cina ingin menunjukkan bahwa mereka terhindar dari semua masalah HAM, malah Cina ingin mendorong agar terwujudnya keadilan bagi sesama.²³

Situasi Politik dalam Relasi Cina dan Tibet

Politik di dalam demokrasi dilihat sebagai usaha *non-zero sum*: dengan bekerja sama semua dapat memperoleh sesuatu bahkan jika semua tidak mendapatkan hasil yang sama. Dalam kerangka berpikir perdamaian demokratis, para pemenang sekalipun dapat dikendalikan untuk tidak menghancurkan yang kalah.²⁴

²¹International Campaign for Tibet.(2010, Maret 11). 2009 Country reports on Democracy, Human Rights, and Labor. Diakses melalui: <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135989.htm>

²²BBC Indonesia. (2013, Oktober 22).Catatan hak asasi manusia Cina di PBB. Diakses melalui: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022_cina_ham

²³ Resti Deviani. *Respon Amerika Serikat Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tibet Tahun 2009-2012* (pp. 58-59).Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Sarjana. 2014.

²⁴ Bruce Russett.*Grasping at the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World*.Princeton, NJ: Princeton University Press. 1993.

Menurut Kant, demokratisasi memberikan contoh *rule of law* (supremasi hukum) yang menyediakan basis yang layak bagi negara untuk mengatasi struktur anarki dan menjaga hubungan damai antar semua yang terlibat.²⁵ Kant menilai *rule of law* merupakan basis dasar penghormatan kebebasan manusia dalam hubungan damai antar negara. Bagi Kant, *rule of law* di tingkat domestik dan internasional saling bergantung, "*league of peace*" harus terdiri dari negara-negara otonom yang mempertahankan kedaulatan mereka. Begitupun dalam kondisi domestik, dimana negara juga mesti memperhatikan kekhasan suatu daerah atau negara bagian tertentu yang memiliki corak dan latar belakang khusus.

Sekarang ini, Tibet merupakan wilayah otonom di Cina. Namun, dalam praktiknya dominasi Cina masih sangat kuat. Indikator tersebut, bisa dilihat dengan ketegangan antar dua wilayah yang selalu saja terjadi, serta pemberian otonomi setengah hati. Hal ini terlihat dengan tindakan Partai Komunis Cina yang menyingkirkan Huo Yabang selaku Sekjen Partai Komunis Cina pasca meninggalnya Mao, yang memberikan status otonomi pada Tibet.

Bentuk pemerintahan Cina yang menganut sistem komunis dan sangat bertolak belakang dengan prinsip demokratis membuat tidak mungkin perdamaian demokratis terwujud (*democratic peace*). Pemerintahan Cina yang bersifat terpusat pada partai komunis membuat Tibet harus mengikuti pola yang diterapkan Cina. Tentu, hal ini menimbulkan friksi, sebab bagi rakyat Tibet mereka merupakan satu bangsa tersendiri yang memiliki sistem dan sejarah panjang. Namun, bagi Cina itu bukan alasan untuk berhenti melakukan

upaya *Cinasisasi* Tibet. Sehingga, konflik berkepanjangan susah untuk dihindari.

Upaya-upaya untuk mengambil opsi jalan tengah juga telah dilakukan oleh Dalai Lama agar demokratisasi di Tibet terwujud. Pada tahun 2004, Dalai Lama pernah mengajukan proposal sebagai solusi untuk masalah Tibet. Proposal usulan Dalai Lama meminta kepada pemerintah Cina agar Tibet memiliki hal yang sama seperti, otonomi yang berlangsung di Hong Kong atau Taiwan, "satu negara, dua sistem."²⁶ Namun, pemerintah Cina menolak proposal karena dituding proposal tersebut memiliki maksud tersirat sebagai strategi untuk mencapai kemerdekaan dalam dua tahap: pertama, otonomi dan kemudian, kemerdekaan.

Dalam menanggapi hal tersebut, pada tahun 2004, Kantor Informasi Dewan Negara China (*China's State Council Information Office*) menerbitkan Buku Putih baru tentang Tibet (*new White Paper on Tibet*)²⁷. Buku Putih yang baru dengan judul "Otonomi Etnis Daerah di Tibet (*Regional Ethnic Autonomy in Tibet*)," tampaknya menutup pintu dialog dengan Dalai Lama tentang otonomi Tibet. Buku Putih Cina yang baru menyatakan bahwa Cina tidak akan mengubah sistem otonomi di Tibet dan sama sekali tidak menyinggung peran Dalai Lama di masa depan Tibet. Buku Putih mengatakan bahwa ide apa pun tentang otonomi khusus, seperti di Hong Kong, yang didasarkan pada "satu negara, dua sistem," adalah "sama sekali tidak dapat dipertahankan." Kebijakan tersebut menyarankan agar Dalai Lama untuk "benar-benar melepaskan pendiriannya pada kemerdekaan Tibet." Bahkan dalam buku putih

²⁵ Steve Chan. In Search of Democratic Peace: Problems and Promise. *Merston International Studies Review* 46, 1, pp. 60. Mei 1997.

²⁶"Dalai Lama Behaving Disingenuously by Pushing 'Middle Way'," *China Daily*, Beijing, 22 July 2003, in FBIS, CPP20030722000010. (Diakses pada 14 September 2018)

²⁷"Regional Ethnic Autonomy in Tibet," Information Office of the State Council of the People's Republic of China, Beijing, May 2004.

tersebut, secara eksplisit disampaikan bahwa masyarakat Tibet tidaklah dikategorikan sebagai suatu “bangsa (*nationality*), tapi mereka hanya merupakan sebuah “kelompok etnis (*ethnic group*).”

Meskipun tidak memberikan status otonomi khusus dan persetujuan terhadap proposal Dalai Lama mengenai “satu negara, dua sistem,” namun Cina menyetujui status Tibet sebagai otonomi etnis regional (*regional ethnic autonomy*). Dalam Buku Putih Cina tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa dengan pemberlakuan otonomi etnis regional maka “masyarakat Tibet akan menikmati hak politik sepenuhnya terhadap otonomi, masyarakat Tibet memiliki kekuatan pengambilan keputusan penuh dalam pembangunan ekonomi dan sosial, masyarakat Tibet memiliki kebebasan untuk mewarisi dan mengembangkan budaya tradisional mereka dan untuk mempraktekkan keyakinan agama mereka, serta jaminan mendasar bagi masyarakat Tibet sebagai tuan atas urusan mereka sendiri.

Tetapi, kerusuhan tahun 2008 di Tibet mencoreng kesepekatan yang telah dibuat sebelumnya serta memiliki dampak politik signifikan bagi Cina. Kerusuhan tersebut menyatukan persepsi internasional tentang Cina yang berlaku otoriter, sedangkan pada saat yang sama Cina menampilkan citra yang positif sebagai tuan rumah Olimpiade Beijing 2008. Peristiwa ini mendorong masalah Tibet menjadi salah satu agenda dalam hubungan Cina-AS dan Cina-Eropa. Atas kejadian tersebut, Eropa meminta agar Cina tidak lagi menyulut konflik dan tidak lagi terlibat di Tibet dengan dalih mengatasi ketegangan. Selain itu, kerusuhan Tibet 2008 mempertegas kembali kehadiran militer atau paramiliter Cina di semua wilayah Tibet, yang sebelumnya sering ditutupi. Kerusuhan Tibet, ditambah dengan protes atas obor Olimpiade di luar negeri, juga mengubah perilaku politik yang dilakukan dan dipikirkan oleh China.

Dalam hal arus informasi, kerusuhan tahun 2008 berbeda dari fase protes sebelumnya di Tibet. Sekitar 2.000 orang Tibet sejak tahun 1980-an yang melarikan diri dari Tibet untuk menetap di India atau Barat, telah menciptakan jaringan sosial yang menghubungkan mereka dengan kerabat atau teman di daerah asal mereka. Ketika protes pecah di Lhasa pada Maret 2008, meluasnya penggunaan teknologi ponsel dan internet di Tibet memungkinkan informasi sampai dengan cepat pada orang-orang Tibet yang baru tiba di pengasingan dan masyarakat internasional.

Dari uraian diatas terlihat kentara sekali ketegangan antara Tibet dan Cina. Menurut Dawa Norbu²⁸, bahwa periode pengaruh Cina tidak langsung atas Tibet relatif berhasil dibanding periode pemerintahan yang langsung, karena seringkali mendapatkan perlawanan dari masyarakat Tibet. Otoritas Cina atas Tibet ditentang setiap kali Cina berusaha untuk menjalankan otoritas politik langsung atas Tibet, seperti pada pertengahan abad ketujuh belas di bawah Manchu atau pada pertengahan abad kedua puluh di bawah Komunis Cina.²⁹ Masyarakat Cina secara tradisional puas dengan pengaruh tidak langsung di Tibet kecuali ketika pengaruh itu terancam. Manchu melakukan intervensi di Tibet hanya untuk mengusir Zhunghar Mongol dan Gurkha dari Nepal. Pada abad ke-20, persepsi orang Tionghoa tentang ancaman terhadap Tibet dipengaruhi oleh intrik Inggris dan Rusia selama Pertandingan Besar, termasuk 1904 invasi Inggris ke Tibet, intrik Amerika di Tibet selama Perang Dingin, dan aliansi Indo-Soviet pada tahun 1970-an.

Oleh karena itu, dengan meluasnya perhatian dunia luar terhadap kasus Tibet memberikan asa

²⁸Dawa Norbu merupakan seorang editor di *Tibetan Review*, serta Profesor di Jawaharlal University in India, New Delhi

²⁹Dawa Norbu. *China's Tibet Policy*. Psychology press. 2001.

terang bagi terwujudnya perdamaian demokratis di Tibet. Upaya untuk menerapkan *rule of law* yang berlaku adil dan menyeluruh pada masyarakat Tibet pun akan semakin terbuka luas.

Kesimpulan

Untuk menganalisis konflik Cina dan Tibet tidak sesederhana yang dibayangkan. Dari beberapa indikator Perdamaian demokratis yang ada, seperti *pertama*, keterhubungan dalam satu lembaga atau organisasi internasional. *Kedua*, kedekatan secara geografis. *Ketiga*, adanya satu aliansi. *Keempat*, distribusi dan alokasi sumberdaya yang merata. *Kelima*, stabilitas politik yang terjamin, hampir semua tidak terpenuhi dengan baik dalam hubungan Cina dan Tibet. Atas dasar inilah, prinsip demokrasi amat sangat sukar diterapkan, apalagi ditengah sistem pemerintahan Cina yang beraliran komunisme. Penguasaan tunggal Cina terhadap semua aspek yang ada, membuat pemberlakuan otonomi khusus di Tibet susah untuk diwujudkan. Tibet kalah dalam hal apapun dibandingkan dengan Cina. Sehingga, harapan besar masyarakat Tibet adalah mencari perhatian dari masyarakat Dunia. Agar kemudian, persepsi negatif yang muncul dari masyarakat Dunia tentang Cina mampu mengubah perilaku dan kebijakan pemerintah Cina atas Tibet. Namun, sekali lagi upaya tersebut pun mendapatkan tantangan penuh dari Cina.

Daftar Pustaka

- Barnett, Robert. (2009). The Tibet Protests of Spring 2008: Conflict between the Nation and the State. *China Perspective*.
- Barton, Phillip J. (2003). *Tibet and China: history, insurgency, and beyond*. Master Thesis, Naval Postgraduate School.
- BBC Indonesia, "Catatan hak asasi manusia Cina di PBB," https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022_cina_ham [Diakses pada 12 Desember 2018]
- Central Tibetan Administration. Glimpses on History of Tibet. <http://tibet.net/about-tibet/glimpses-on-history-of-tibet/> [Diakses pada 12 September 2018]
- Chan, Steve. (1997). In Search of Democratic Peace: Problems and Promise. *Mershon International Studies Review* 46, 1.
- Cheng, Tao. *Negara Bangsa (jilid 3; Asia)*.
- China Daily. Dalai Lama Behaving Disingenuously by Pushing 'Middle Way'. Beijing, 22 July 2003, in FBIS, CPP20030722000010 [Diakses pada 14 September 2018]
- Deutsche Welle. Tiada Perdamaian di Shangri-La – Konflik China dan Tibet. <http://www.dw.com/id/tiada-perdamaian-di-shangri-la-konflik-china-dan-tibet/a-4081865> [Diakses pada 12 Desember 2018]
- Deviani, Resti. (2014). *Respon Amerika Serikat Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tibet Tahun 2009-2012*. Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- DH, Agung. *China Mulai Eksploitasi Air Alami Tibet*. <https://tirto.id/cina-mulai-eksploitasi-air-alami-tibet-cc4m> [Diakses pada 12 Desember 2018]
- Dorjee, Tenzin. (2015). *The Tibetan Non-Violent Struggle: A Strategic and Historical Analysis*.

- Washington: International Center on Non-Violent Conflict.
- Doyle, Michael W. (2012). *Liberal Peace: Selected Essays*. London and New York: Routledge.
- Elman, Miriam Fendius. (1997). Introduction. The Need for a Qualitative Test of the Democratic Peace Theory dalam Manan, Munafrizal. (2014). The Democratic Peace Theory and Its Problem. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 10, 2.
- F., Stephanie R. (2010) *Demonstrasi Anti China di Lhasa, Tibet pada maret 2008*. Jember: Skripsi Unej.
- Hastuti, Maya. (2011). *Opsi Jalan Tengah Dalai Lama dalam Penyelesaian Konflik China-Tibet*. *Jurnal Studi Hubungan Internasional UMM*. Vol. 1, No. 1, 57.
- Information Office of the State Council of the People's Republic of China. *Regional Ethnic Autonomy in Tibet*. May 2004.
- International Campaign for Tibet. (2009). <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135989.htm>. [Diakses pada 12 Desember 2018]
- International campaign for Tibet. Legislative Landmark: US Congress Passes Reciprocal Access to Tibet Act. <https://www.savetibet.org/legislative-landmark-us-congress-passes-reciprocal-access-to-tibet-act/> [Diakses pada 12 Desember 2018]
- Norbu, Dawa. (2001). *China's Tibet Policy*, Psychology Press.
- Rosato, Sebastian. (2003). The Flawed of Democratic Peace Theory *American Political Science Review* 97, 4.
- Russett, Bruce. (1993). Grasping at the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World. Princeton: Princeton University Press.
- Smith Jr., W. S. (1996). *Tibetan Nation*. Boulder. CO: Westview Press, Inc.
- Smith, Warren. *A Compilation of A Series of "Expert on Tibet Program" for Radion Free Asia* based upon the Book *Spoiling Tibet: China and Resource Nationalism on the Roof of the World* by Gabriel Lafitte.
- Smith, Warren. (2004). China's Policy on Tibetan Autonomy. *East West Center Washington Working Papers* 2.
- UNDP. (2010). *Tibet Development and Poverty Alleviation Programme*. China: United Nations Development Programme.